

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya, 2016, *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Aryani P, Dyah, *et.al.*, 2015, Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif, J, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Carter, Megan, dan Andrew Bouris, 2006, *Freedom of Information Balancing the Public Interest*, Constitution Unit School of Public Policy University College London, London.
- Graham, John, *et.al.*, 2003, *Principles for Good Governance in the 21st Century*, Institute on Governance, Canada.
- Haryanto, Ignatius, 2005, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi*, Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan UNESCO, Jakarta.
- Hikmat, Mahi M, 2014, *Potret Keterbukaan Informasi Publik, Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat.
- Londa, Annie, *et.al.*, 2015, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Pratikno, *et.al.*, 2012, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prayitno, Dessy Eko, *et.al.*, 2012, *Penafsiran Atas Pengecualian dalam Hak Atas Informasi: Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain*, Gajah Hidup, Jakarta.
- Sirajuddin, *et.al.*, 2011, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono *et.al.*, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

_____ 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suwitri, Sri, 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5.

C. Penelitian

Affy Ihsan Takfim Kusuma, 2017, *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Perspektif Good Governance*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ermy Rizkawati dan Lisman Manurung, 2013, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri RI*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

KONTRAS dan Centre for Law and Democracy (CLD), 2013, Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011.

Saiyidito Hatta, 2018, *Kewenangan dan Tugas Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta (Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Jurnal

Agusly Irawan Aritionang, Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 3, Juli 2011.

Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)”, *Jurnal Perspektif* Volume XVII No.1, 2012.

Fauzi Syam, “Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi”, *Jurnal Inovatif* Volume VIII Nomor I Januari 2015.

Nunuk Febriananingsih, “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1, April 2012.

E. Modul dan Makalah

Indonesian Center for Environmental Law, Modul Bagi Badan Publik Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

F. Putusan Komisi Informasi Pusat

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/VI/KIP-PS-A/2013 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Ari Widodo dengan PPID Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Forum Diskusi Supporter Indonesia dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Muhammad Fikri Suadu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2015 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Greenpeace Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 perihal penyelesaian sengketa informasi publik antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

G. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2014 perihal kasasi perkara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 6 November 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 546K/TUN/2015 perihal kasasi perkara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), 29 Oktober 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-KIP/2015 perihal kasasi perkara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), 30 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/TUN/2017 perihal kasasi perkara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 06 Maret 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017 perihal kasasi perkara Greenpeace Indonesia, 13 Juni 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/KI/2017 perihal kasasi perkara Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 14 September 2017.

H. Sumber Internet

Alamsyah Saragih, 2015, Menguji Kepentingan Publik, <https://aasaragih.wordpress.com/2015/12/14/menguji-kepentingan-publik/#more-361>, diakses pada Kamis, 30 Agustus 2018

Alamsyah Saragih, 2015, Pengujian Terhadap Konsekuensi Bahaya, <https://aasaragih.wordpress.com/2015/11/06/pengujian-terhadap-konsekuensi-bahaya/> diakses pada hari rabu, 5 September 2018

Karel Salim, *KI Pusat Perintahkan Termohon Lakukan Uji Konsekuensi* <https://www.komisiinformasi.go.id>, diakses pada hari kamis 13 September 2018

<http://psda.jatengprov.go.id/daftar-informasi-publik.html> diakses pada hari kamis 13 September 2018